

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN BERBASIS PEMANFAATAN
SUMBERDAYA LOKAL MELALUI PENDEKATAN
SOSIAL *ENTERPRENEURSHIP***

Abd. Ghofur¹, Ety Youhanita², Sofia Tri Septiawati³, Kuswanto⁴

¹*Universitas PGRI Adi Buana*

Jl. Sunan Giri No.35, Beringin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62215

Email: ghofurkita@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi perempuan miskin dalam pemenuhan kebutuhan keluarga di Kabupaten Lamongan, (2) menganalisis model pemberdayaan perempuan miskin dalam pemanfaatan sumberdaya lokal untuk pengentasan kemiskinan melalui Pendekatan Sosial *Entrepreneurship* yang ada di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Responden dalam penelitian ini berasal dari 6 (enam) kecamatan yang mewakili lima wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Lamongan, Babat, Sambeng, Sugio, Turi dan Paciran yang dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 140 orang yang merupakan perempuan yang mengelola sumber daya untuk berwirausaha. Selain data yang diperoleh melalui survei lapangan, juga dilengkapi analisis data sekunder yang berasal dari instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan lainnya. Instrumen pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 tahun sebanyak 1.379.731 orang, dengan 688.445 orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa pekerjaan tertinggi perempuan di Kabupaten Lamongan adalah mengurus rumah tangga sebanyak 21.93%, lalu sebanyak 20.21% belum/tidak bekerja, kemudian sebagai petani/pekebun sebanyak 19.76%, kemudian yang berwiraswasta sebesar 14.83%, serta beberapa pekerjaan lainnya. Selain itu, cukup banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga (KK), yakni ada sebanyak 78.263. Gambaran kehidupan perempuan kepala keluarga melekat dengan kemiskinan. Maka, program pemberdayaan perempuan yang sesuai dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Pendampingan dalam berwirausaha sebagai upaya untuk menjadikan perempuan lebih bisa mandiri secara finansial. Potensi sumber daya lokal yang melimpah kalau bisa dimanfaatkan secara optimal akan sangat membantu masyarakat sekitar dalam mengembangkan perekonomian keluarganya. Adapun kendala yang dihadapi oleh perempuan miskin dalam mengembangkan sumber daya lokal untuk kegiatan berwirausaha adalah kurangnya modal yang dimiliki, adanya keterbatasan bahan baku serta minimnya keterampilan dalam mengembangkan produk, serta kondisi Sumber Daya Manusia berpendidikan masih rendah, juga kurangnya sarana dalam pelatihan.

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, sosial entrepreneurship

ABSTRACT

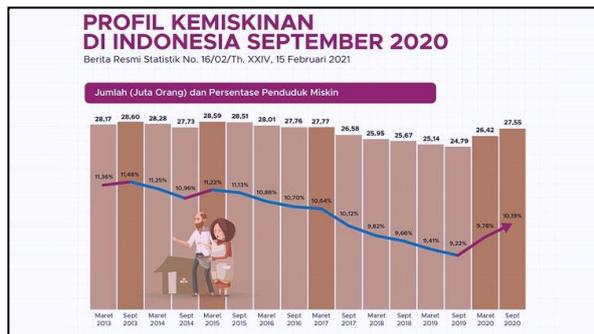
The purpose of this study (1) determine the potential of poor women in meeting family needs in Lamongan Regency, (2) analyze the model of empowering poor women in the use of local resources for poverty alleviation through the Social Entrepreneurship Approach in Lamongan Regency. This study uses a survey research design. Respondents in this study came from 6 (six) sub-districts representing five regions in Lamongan Regency, namely Lamongan, Babat, Sambeng, Sugio, Turi and Paciran sub-districts which were selected using the Stratified Random Sampling technique with a total of 140 respondents who were women. managing resources for entrepreneurship. In addition to data obtained through field surveys, secondary data analysis is also provided from relevant agencies, such as the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the Office of Social Affairs and others. Instruments of data collection by questionnaires, interviews, observation and documentation. The results showed that the population of Lamongan Regency in the 1st semester of Clean Consolidated Data (DKB) was 1,379,731 people, with 688,445 women. Based on data analysis, it is known that the highest job for women in Lamongan Regency is taking care of the household as much as 21.93%, then 20.21% not yet/not working, then as farmers/planters as much as 19.76%, then those who are self-employed by 14.83%, as well as several other jobs. In addition, there are quite a number of women who are heads of families (KK), namely 78,263. The picture of the life of the female head of the family is attached to poverty. Thus, appropriate women's empowerment programs are carried out through coaching and training for women heads of families (PEKKA) in business management guidance activities for women in managing businesses. Assistance in entrepreneurship as an effort to make women more financially independent. The potential of abundant local resources if they can be utilized optimally will greatly help

the surrounding community in developing their family's economy. The obstacles faced by poor women in developing local resources for entrepreneurship activities are the lack of capital, the limited raw materials and the lack of skills in developing products, and the condition of educated Human Resources is still low, as well as the lack of training facilities.

Keywords: *women empowerment, social entrepreneurship*

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 yang terjadi hampir dua tahun ini juga telah menambah daftar panjang angka kemiskinan di Indonesia. Menurut Katadata (2020) jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.



Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terus menjadi perhatian utama pemerintah. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Dimensi kemiskinan tidak hanya berada pada dimensi ekonomi, namun juga melibatkan dimensi lainnya, seperti sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi (Basuki & Prasetyo, 2007). Chambers mengemukakan bahwa inti dari masalah kemiskinan terletak pada deprivation trap atau jebakan kekurangan

yang meliputi lima unsur yaitu (1) kemiskinan itu sendiri; (2) kelemahan isik; (3) keterasingan; (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan (Soetrisno, 1995). Salah satu faktor penting yang sering dilupakan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah dimensi feminis dan ketimpangan gender. Kemiskinan selalu menampilkan wajah perempuan di depan. Banyak peneliti kontemporer mengungkapkan, dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga. Penyebabnya adalah berbagai peran perempuan miskin yang diambil dalam keluarga (Marwanti & Astuti, 2011), meliputi: pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; dan keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis (Basuki & Prasetyo, 2007).

Komitmen internasional United Nation Millenium Declaration (2000) memuat satu rekomendasi penting untuk diterapkan di semua negara yaitu: *"to promote gender equality and empowerment of women as effective ways to combat poverty, hunger and disease and to stimulate development that is sustainable"* (Marwanti & Astuti, 2011). Komitmen internasional tersebut menegaskan pentingnya upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk mengeliminasi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan perspektif gender dalam melihat kemiskinan tidak untuk mengecilkkan arti kemiskinan yang dialami laki-laki, tetapi untuk menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami perempuan bersifat

spesifik, sehingga dibutuhkan adanya penanganan yang khusus pula (Darwin, 2005).

Terdapat tiga alasan penting kenapa perempuan wajib diberdayakan dalam konteks pengentasan kemiskinan, yaitu: (1) karena perempuan mempunyai kepentingan yang sama dalam pem-bangunan, dan juga merupakan pengguna hasil pembangunan yang mempunyai hak sama dengan laki-laki; (2) perempuan juga memiliki kepentingan yang khusus sifatnya bagi perempuan itu sendiri dan anak-anak, yang kurang optimal jika digagas oleh laki-laki karena membutuhkan kepekaan yang sifatnya khusus, terkait dengan keseharian, sosio kultural yang ada; dan (3) memberdayakan dan melibatkan perempuan dalam pembangunan, secara tidak langsung akan juga memberdayakan dan menularkan semangat yang positif kepada generasi penerus, yang pada umumnya dalam keseharian sangat lekat dengan sosok ibu (Ratnawati, 2011).

Hasil analisis berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2019 menunjukkan bahwa paling tidak 11 juta rumah tangga dikepalai oleh perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 15% dari total rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kondisi hidup lebih buruk dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki pada 2019. Perempuan kepala rumah tangga beserta keluarganya tinggal di tempat dengan keterbatasan mengakses air bersih, kebersihan yang buruk, dan ruang yang sempit.

Kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan telah dilakukan melalui berbagai cara, namun pendekatan yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan semata (*income generating*) dan kurang memperhatikan peran perempuan miskin sebagai subjek pembangunan. Pengentasan kemiskinan dengan upaya memberdayaan perempuan diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan mengingat jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga terus bertambah. Lebih dari itu, perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga, baik sebagai istri, ibu dari anak-anak, bahkan sebagai penopang ekonomi keluarga.

Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan secara nasional didominasi oleh kaum perempuan. Bahkan Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi mengatakan bahwa dari sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki sangat timpang.

Tabel 1. Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan

Jenis Kelamin	Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin		
	2018	2019	2020
Laki - Laki	9.59	9.18	9.59
Perempuan	10.06	9.63	9.96

Sumber: BPS (2021)

Berkaitan dengan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan lima kecamatan sebagai *pilot project* percepatan penanganan kemiskinan. Penetapan ini sekaligus sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung langkah pemerintah memberantas kemiskinan ekstrem pada 2024. Hal ini terungkap setelah Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (Kompas, 2021). Pemilihan lima lokasi prioritas ini berdasarkan DTKS dan IDM tertinggi, sesuai ketentuan dari TNP2K. Lima kecamatan yang dipilih meliputi Kecamatan Babat, Kedungpring, Sugio, Sambeng, dan Modo. Dari lima kecamatan ini akan diambil lima desa prioritas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintah Daerah telah menyiapkan tiga strategi dalam penanganan kemiskinan ekstrem yang ada di Lamongan. Mulai dari program yang mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Konsep penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan, salah satunya yang dilakukan pemerintah daerah melalui program *home care service*. Melalui program ini, keluarga yang rentan memiliki risiko tinggi terhadap timbulnya masalah kesehatan, akan didata dan diinventarisasi untuk dipenuhi kebutuhan dasar (bio-psiko-sosial-spiritual)

secara mandiri, ditingkatkan kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan, serta meningkatkan kualitas. Intervensi ini juga akan disesuaikan dengan kondisi yang dialami warga mulai dari pelayanan kesehatan di rumah, pemenuhan asupan gizi, sanitasi, air bersih, hingga kelayakan rumah tinggal dan akses bantuan sosial. Hal ini merupakan program gropyokan lintas perangkat daerah berkesinambungan dan komprehensif.

Sehubungan hal tersebut, perlu kiranya melakukan kajian yang berjudul PEMBERDAYAAN Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial *Entrepreneurship*.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Responden dalam penelitian ini berasal dari 6 (enam) kecamatan yang mewakili lima wilayah yang ada di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Lamongan, Babat, Sambeng, Sugio, Turi dan Paciran yang dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling* dengan jumlah responden sebanyak 140 orang yang merupakan perempuan pengelola usaha, dan perempuan kepala keluarga. Selain data yang diperoleh melalui survei lapangan, juga dilengkapi analisis data sekunder yang berasal dari instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, dan lainnya. Instrumen pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Penyajian data dibuat dalam bentuk deskriptif yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dengan menggunakan tehnik tabulasi, dengan menyajikan hasil penelitian tabel-tabel distribusi frekuensi dengan persentase untuk masing-masing kelompok.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi Perempuan di Kabupaten Lamongan

Menurut Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester 1 tahun 2021 yang dirilis oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten

Lamongan sebanyak 1.379.731 orang, dengan rincian 691.286 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebanyak 688.445 orang berjenis kelamin perempuan.

Keberadaan perempuan di Kabupaten Lamongan tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Terlebih dalam lingkungan sosial, perempuan seringkali dibedakan dengan laki-laki. Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa pekerjaan tertinggi perempuan di Kabupaten Lamongan adalah mengurus rumah tangga sebanyak 21.93% (150.963 orang) dari jumlah perempuan di Kabupaten Lamongan, lalu sebanyak 139.132 orang perempuan belum/tidak bekerja atau sebesar 20.21%, kemudian sebagai petani/pekebun sebanyak 19.76% (136.031 orang), kemudian sebanyak 102.076 berwiraswasta atau sebesar 14.83%, serta beberapa pekerjaan lainnya.

Di beberapa daerah yang ada di kabupaten Lamongan, cukup banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga (KK). Sebagai kepala keluarga tentu memiliki tanggung jawab yang besar, khususnya terkait dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan analisis data diketahui bahwa jumlah KK perempuan terbanyak ada di Kecamatan Babat (6239 KK) atau sekitar 8%, lalu disusul Kecamatan Paciran sebanyak 5863 KK atau sekitar 7,5%, dan berikutnya menyusul Kecamatan Brondong sekitar 6,6%, yakni sebanyak 5140 KK. Walaupun ada kesetaraan gender, namun peran perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki sebagai kepala keluarga. Berdasarkan analisis data penelitian diketahui bahwa di Kabupaten Lamongan ada sebanyak 78.263 perempuan yang menjadi kepala keluarga.

Gambaran kehidupan perempuan kepala keluarga melekat dengan kemiskinan. Karena kemiskinan, maka perempuan kepala keluarga mengalami perkawinan muda dan perkawinan dilakukan berulang kali dengan harapan akan ada seorang laki-laki yang dapat membantu mengatasi persoalan ekonomi. Nampaknya hal tersebut hanya menjadi sebuah mimpi. Karena kemiskinan maka perkawinannya selalu dilakukan dibawah tangan yang berdampak tidak adanya perlindungan hukum pada perempuan kepala keluarga. Dengan tidak adanya perlindungan hukum, maka perempuan tidak dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak nafkah bagi anak dan anak juga tidak mendapat legalitas hukum, selain itu

sepanjang hidupnya perempuan tidak punya kontrol meskipun terhadap dirinya sendiri.

Perempuan dalam banyak kasus sering kali menjadi obyek kekerasan. Hal ini sebagaimana hasil temuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang menjelaskan kalau setidaknya dalam lima tahun terakhir terdapat 69 kasus yang dialami oleh perempuan. Rata-rata kasus yang dialami adalah kekerasan fisik dan berakhir dengan perceraian dan perebutan hak asuh. Belum semua kasus bisa terselesaikan, menurut data baru 19 kasus yang telah terselesaikan. Secara detail, bisa dilihat pada tabel 1.2

Tabel 2. Kasus Perempuan di Kabupaten Lamongan

Jumlah Perempuan Miskin	Kecamatan	Rata-rata aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari	Keterangan
42.312	27	Pedagang dan bertani	Perempuan miskin tersebut berdasarkan data penerima PKH, BPNT/ Sembako

Sumber: Dinas PPPA Kabupaten Lamongan (2021)

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021) program pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) dalam kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. Pendampingan dalam berwirausaha sebagai upaya untuk menjadikan perempuan lebih bisa mandiri secara finansial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya tanpa ketergantungan dengan pihak lain.

Model Pemberdayaan Perempuan Miskin dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Sosial *Entrepreneurship*

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan khususnya pada kaum perempuan, Pemerintah Daerah melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan

beragam upaya. Misalnya yang dilakukan Dinas Sosial dengan memberikan bantuan sosial, baik melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), maupun yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT). Setidaknya berdasarkan analisis data penelitian diketahui bahwa jumlah perempuan miskin yang ada di Kabupaten Lamongan sebanyak 42.312 orang dengan rata-rata perempuan tersebut memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berdagang dan bertani.

Tabel 3. Data Perempuan Miskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah Perempuan Miskin	Kecamatan	Rata-rata aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari	Keterangan
42.312	27	Pedagang dan bertani	Perempuan miskin tersebut berdasarkan data penerima PKH, BPNT/ Sembako

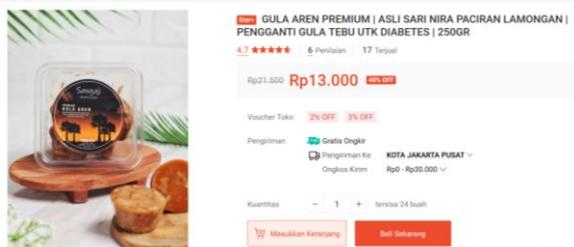
Sumber: Dinas Sosial (2021)

Selain dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pemerintah daerah juga aktif memberikan kegiatan pelatihan kewirausahaan sebagai upaya memberdayakan perempuan miskin untuk bisa survive meningkatkan perekonomian keluarga melalui *entrepreneurship*. Salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, melakukan kegiatan penumbuhan wirausaha baru lewat pelatihan pembuatan olahan minuman sesuai dengan sumber daya lokal di daerah tersebut. Pelatihannya meliputi pembuatan bahan, proses produksi, label hingga pemasaran olahan minuman bagi ibu rumah tangga.



Gambar 2. Pelatihan pembuatan olahan minuman bagi ibu rumah tangga

Kabupaten Lamongan merupakan daerah dengan sumber daya lokal yang melimpah. Potensi ini kalau dikembangkan secara maksimal untuk kegiatan berwirausaha bagi para perempuan miskin yang ada di wilayah masing-masing tentu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi, baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Misalnya saja di Kebon Raya salah satu di desa Paciran yang mata pencarian warga sebagai petani memiliki sumber daya tanaman siwalan. Pemberdayaan potensi tanaman dengan membuat gula aren bubuk dan stik siwalan.



Gambar 3. Proses pembuatan gula aren dari siwalan yang ada di Paciran Lamongan yang produknya juga telah dipasarkan melalui aplikasi jual beli online.

Selain gula aren, juga ada jumbrek, marning, ental, kripiq sunduk, es siwalan, batik dan banyak lagi yang lain yang bisa dioptimalkan sumber daya lokal di daerah paciran bagi perempuan disana untuk kegiatan entrepreneurship. Selain juga sebagai daerah pesisir pengolahan ikan untuk digunakan sebagai beragam olahan juga sudah dilakukan.

Pengembangan potensi sumber daya lokal lainnya berada di Kecamatan Turi, tepatnya berada di Desa Bambang. Para perempuan di daerah ini mengembangkan telur bebek untuk dijadikan sebagai telur asin. Hampir disetiap rumah yang ada di desa ini menjadikan telur asin sebagai kegiatan berwirausaha. Bahkan pada tahun 2012 silam, peternak itik yang ada di Desa Tawangrejo berhasil memperoleh penghargaan sebagai pemenang pertama kelompok peternak itik dalam lomba kelompok peternak dan petugas berprestasi yang berasal dari kelompok ibu-ibu desa setempat dari Menteri Pertanian dan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dan Ketahanan Pangan kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan dari Presiden RI. Kelompok peternakan ini berawal dari kegiatan ibu-ibu rumah tangga di Desa Tawangrejo pada awal tahun 2008. Usaha ini

dipelopori oleh Hj Musarofah yang kemudian membentuk kelompok peternak itik bernama Sumber Rejeki. Dari jumlah anggota hanya belasan orang kemudian terkumpul sebanyak 40 anggota. Usaha ini berkembang hingga anggotanya mencapai 120 orang. Anggota kelompok juga melibatkan sebanyak 856 kepala keluarga di Desa Tawangrejo. Hasil berternak itik ini kemudian oleh beberapa keluarga dikembangkan lagi dalam bentuk usaha telur asin.



Gambar 4. Kegiatan ibu-ibu di Desa Bambang Turi dalam memproduksi telur asin dan juga telah dipasarkan secara online

Kegiatan berwirausaha yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di daerahnya juga bisa dilihat di Kecamatan Babat. Salah satunya adalah pembuatan makanan tape dari singkong yang ada di Daerah Sumurgenuk. Selain tape ada makanan khas Babat lagi yakni wingko dari bahan kelapa, kemudian krupuk, budidaya tawon liar untuk produksi madu, jamu temu lawak dan beraskencur, serta lain sebagainya.





Gambar 5. Kegiatan ibu-ibu di Desa Sumurgenuk Babat dalam memproduksi tape dari tanaman singkong

Masih banyak lagi potensi sumber daya lokal daerah yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan yang ingin berwirausaha. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2021) semua perempuan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian di keluarganya, oleh sebab itu perempuan miskin dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk berwirausaha. Keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah berupaya dalam memfasilitasi perempuan miskin untuk berwirausaha memanfaatkan sumber daya lokal. Diantaranya dengan memberikan pelatihan untuk menumbuhkan wirausaha baru. Setidaknya hingga tahun 2021 ini terdapat 1000 orang pengusaha perempuan yang berada di 25 desa yang ada di Kabupaten Lamongan (Disperindag, 2021).

PEMBAHASAN

Di Kabupaten Lamongan saat ini terdapat lebih dari 300 ribu pelaku UMKM dan 17.212 unit Industri Kecil Menengah (IKM) yang tengah bangkit setelah terpuruk akibat pandemi. Dari jumlah itu terdapat 16 produk dari 13 IKM Lamongan yang sudah lolos akurasi retail modern dan telah terdistribusi di 51 gerai. Pemerintah Daerah juga terus berupaya mendorong dan menciptakan 10 ribu wirausaha baru dari sektor UMKM dan IKM ini. Dengan jumlah tersebut, bisa dikatakan hampir 25-30 persen masyarakat Lamongan sebagai pelaku usaha yang kontribusinya sangat besar dalam ekonomi Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu terus memfasilitasi UMKM Lamongan melalui berbagai kemudahan. Antara lain, dalam perijinan,

permodalan, pembinaan, sarana prasarana, serta pemasaran produk. Menurut Media Indonesia (2021) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan akan terus menciptakan iklim usaha yang lebih baik, yakni dengan mendorong dan menciptakan 10 ribu wirausaha baru dari sektor UMKM dan IKM ini.

Sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Lamongan sangat variatif dan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan para ibu-ibu untuk berwirausaha. Misalnya potensi tanaman siwalan yang ada di wilayah Paciran. Tanaman siwalan menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan pendapat masyarakat, khususnya yang ada di Desa Kebon Raya. Siwalan merupakan pohon palma yang mirip aren dan kelapa namun memiliki buah berbeda (Mojiono & Mubarak, 2019). Buah siwalan berbentuk bulat dengan daging buah yang lembut. Pohon ini biasa tumbuh di daerah pesisir yang kering (Sustiyana et al., 2013). Buah siwalan bukan hanya memiliki rasa yang nikmat tetapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi, sehingga mengkonsumsi buah siwalan tentunya akan sangat baik bagi tubuh (Krisnawati et al., 2019).

Siwalan merupakan komoditas pertanian yang unik dan unggul, sejauh ini masyarakat memanfaatkan siwalan untuk komoditas perdagangan dengan cara konvensional (Apriyanti, 2018). Selain bertani warga desa Kebon Raya, memanfaatkan tanaman siwalan sebagai tambahan pemasukan keuangan keluarga. Di desa ini oleh masyarakat pohon siwalan dijual sebagai minuman legen, gula aren dan buah. Legen merupakan air nira yang keluar dari pohon Siwalan melalui tangkai tandan bunga yang dipotong kemudian disadap. Akan tetapi, legen cepat sekali basi. Kesegarannya hanya bisa bertahan satu hari. Lebih dari itu, legen mengalami fermentasi, rasanya jadi kecut. Kandungan gula pada legen berubah menjadi cuka dan alkohol. Makin lama terfermentasi, makin tinggi kandungan alkoholnya. Dalam bahasa setempat, legen yang telah basi disebut tuak, karena mengandung banyak alkohol.

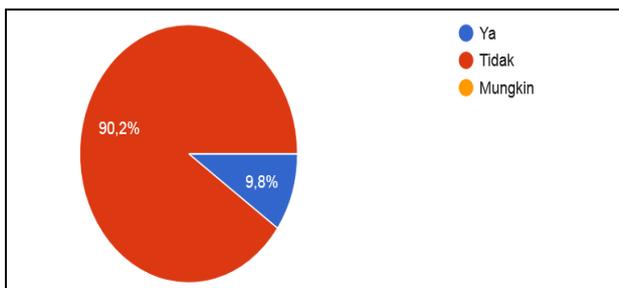
Pemanfaatan tanaman siwalan untuk beragam komoditas usaha akan dapat menambah nilai ekonomi tanaman tersebut. Apalagi perempuan dengan segala keuletannya mampu memanfaatkan tanaman tersebut untuk digunakan beragam jenis produk, seperti gula aren, es dawet siwalan, dan lain sebagainya.



Gambar 6. Rujak khas paciran bisa dilihat di hampir sepanjang jalan raya paciran yang mejual aneka produk sumber daya lokal daerah setempat

Persoalannya adalah bagaimana masyarakat dapat didorong berwirausaha sesuai dengan karakteristiknya. Menurut Purwanti (2012) bahwa karakteristik wirausaha berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Termasuk dalam hal ini adalah para perempuan miskin perlu diberikan pemberdayaan dan pendampingan untuk mau berwirausaha sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Kegiatan pemberdayaan tersebut tentu butuh untuk dilakukan secara merata di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Lamongan. Sebab belum semua daerah memberikan pelatihan untuk membekali keterampilan berwirausaha bagi para perempuan miskin yang ada di Kabupaten Lamongan. Hal ini diketahui dari hasil analisis data penelitian yang menunjukkan bahwa sebanyak 90,2% responden mengatakan kalau belum pernah ada kegiatan pemberdayaan yang mereka dapatkan untuk membekali keterampilan berwirausaha, dan sisanya sebanyak 9,8% responden mengatakan kalau di daerah mereka ada kegiatan pemberdayaan bagi perempuan dalam mengembangkan *entrepreneurship* di masyarakat.



Sumber: Analisis Data Penelitian (2021)

Gambar 7. keberadaan kegiatan pemberdayaan berbasis kewirausahaan bagi perempuan

Masih banyak perempuan miskin yang ada di Kabupaten Lamongan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, khususnya dalam pemberdayaan mereka dalam memanfaatkan sumberdaya lokal untuk kegiatan berwirausaha. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan miskin.

Kendala yang dihadapi oleh perempuan miskin dalam mengembangkan sumber daya lokal untuk kegiatan berwirausaha menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan (2021) adalah kurangnya modal yang dimiliki. Sedangkan menurut Disperindag (2021) kendala yang dihadapi perempuan miskin dalam berwirausaha selain karena keterbatasan modal juga adanya keterbatasan bahan baku serta minimnya keterampilan dalam mengembangkan produk.

Sedangkan menurut Dinas Sosial (2021) kendala yang dihadapi oleh perempuan miskin dalam berwirausaha adalah karena kondisi Sumber Daya Manusia yang berpendidikan masih rendah, juga kurangnya sarana dalam pelatihan.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dirumuskan rekomendasi yang di sarankan untuk instansi terkait sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melalui instansi terkait perlu mengintensifkan kegiatan pemberdayaan perempuan miskin berbasis sosial *entrepreneurship* dengan tepat sasaran dan

- berkelanjutan, karena belum banyak perempuan miskin yang tersentuh kegiatan pelatihan maupun pendampingan untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di daerah tersebut.
2. Banyak perempuan miskin terkendala modal untuk memulai berwirausaha, oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi secara bertahap dan merata pemberian modal dengan membentuk komunitas wirausaha perempuan miskin agar bisa berkolaborasi untuk saling membantu bagi yang telah berhasil.
 3. Pemerintah Desa perlu mengalokasikan dana desa secara intensif dan berkesinambungan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan miskin melalui kegiatan berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di desa tersebut sehingga bernilai ekonomi.
 4. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan sumber daya lokal yang ada di desa-desa di Kabupaten Lamongan. Hal ini untuk mempermudah dalam mengembangkan potensi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan berwirausaha.
 5. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan dalam memfasilitasi para perempuan yang telah memiliki usaha, baik dalam bentuk izin usaha, cara pengemasan produk yang bernilai tinggi, promosi, hingga strategi penjualannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, I. R. (2018). Studi Potensi Pemanfaatan Limbah Serat Batok Siwalan (*Borassus Flabellifer* L.) Sebagai Bahan Baku Kerajinan Lokal (Benang) Gresik. *Jurnal Teknologia*, 1(1), 79–86. <https://Aperti.EJournal.Id/Teknologia/Article/View/1>
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, A. & Prasetyo, Y.E. (2007). *Memusiumkan Kemiskinan*. Surakarta: PATTIRO Surakarta.
- Darwin, M. (2005). *Memanusikan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Benang Merah.
- Erwan dan Dyah. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Jakarta: Gava Media.
- Fariad dan Syamsu. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, J. (1992). *Empowerment the Political of. Alternative Development*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, Three Cambridge Center.
- Gie, K.K. (2001). *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 yang Berwawasan Gender*. Makalah pada Rakernas Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: BAPPENAS.
- Iqbal. (2004). *Penelitian Survei*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kamase, J. & St. Sukmawati, S. (2019). Pelatihan Pembuatan Pembuatan Produk Stick Siwalan. *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2): 47-53.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Krisnawati, I., Jazimatul, Agus, M., & Dhini, S. (2019). J-Lan (Jelly Siwalan Khas Tuban) Kekayaan Lokal Bumi Wali. *Prosiding Seminar Nasional*, 4(1), 58–62. http://Prosiding.Unirow.Ac.Id/Index.Php/Sn_asppm/Article/View/282
- Marwanti, S. & Astuti, D. (2011). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karang Anyar. *SEPA*, Vol 9 N0 1, September 2012.

- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1985). *Qualitative Data Analysis: A Source-book of New Methods*. London: Sage Publications.
- Muttalib, J.A. (1993). *Menggunakan Kerangka Pemampuan Wanita, dalam Moeljarto Tjokrowinoto, dkk. Bahan Pelatihan Jenderdan Pembangunan*. Kantor Menteri Negara UPW.
- N. Gregory Mankiw, Euston Quah, Peter Wilson, (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, L.I. (ed). (1996). *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia-70 Tahun Prof. Sajogyo*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Nugroho, I. dan Dahuri, R. (2004). *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Edisi 4 Cet. 5. Jakarta:Pustaka LP3ES.
- Prasetyo, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Purwanti, E. (2012). Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga. *Among Makarti*, 5(9), 13-28
- Ratnawati, S. (2011). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan melalui Pengembangan Kewirausahaan, *Jurnal Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2 Desember 2011.
- Schumpeter, J.A. (1997). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London: Routledge.
- Soetrisno, L. (1995). *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*. Dalam Dewanta (ed). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Medi.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat JPS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sustiyana, Syafrial, & Purnomo, M. (2013). Analisis Supply Chain Dan Efisiensi Pemasaran Gula Siwalan (Studi Kasus Di Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep). *Habitat*, 24(2), 110-119
- Tjokrowinoto, M. (1995). *Teori Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Zimerrer, T.W. dan Scarborough, N.M. (1993). *Essentials Entrepreneurship and Small Business Management*. 2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.